



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NURTAMI**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG RISET DAN INOVASI**
3. NHK : **807142**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 3.248.300.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 299 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.650.000.000
2. Bangunan Seluas 34 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
3. Tanah Seluas 680 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, WARISAN Rp. 34.000.000
4. Tanah Seluas 4684 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, WARISAN Rp. 234.300.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 355.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
2. MOBIL, HONDA FREED Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 45.000.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 1.802.255.762****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 5.450.555.762****III. HUTANG****Rp. 1.260.981.347****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 4.189.574.415**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.